



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS TADULAKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAGAF**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**
3. NHK : **494616**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 541.505.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m2/131 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 384.500.000
2. Tanah Seluas 1.902 m2 di KAB / KOTA PARIGI MOUTONG, Rp. 23.775.000
3. Tanah Seluas 2.085 m2 di KAB / KOTA PARIGI MOUTONG, Rp. 26.062.500
4. Tanah Seluas 1.833 m2 di KAB / KOTA PARIGI MOUTONG, Rp. 22.912.500
5. Tanah Seluas 1.768 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, Rp. 26.460.000
6. Tanah Seluas 1.325 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 20.295.000
7. Tanah Seluas 495 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, Rp. 15.000.000
8. Tanah Seluas 748 m2 di KAB / KOTA PARIGI MOUTONG, Rp. 22.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 268.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA V (TGN40-GKMNKD 10) MINIBUS Tahun 2013, LAINNYA Rp. 105.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 145.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BKU A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.



18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 101.594.494

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 911.099.494

III. HUTANG

Rp. 29.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 882.099.494

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.